

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Oleh:**

**ARUM SARI**

**B 200 110 185**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENINGKATAN KERJASAMA SISWA MELALUI *INQUIRY BASED*  
*LEARNING* PADA MUATAN PELAJARAN IPA MATERI  
MAKHLUK HIDUP DI KELAS III MIM BOLON  
TAHUN 2019/20209**

**PUBLIKASI ILMIAH**

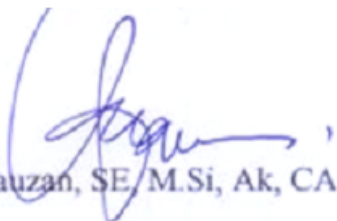
oleh:

**ARUM SARI**

**B 200 110 185**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Fauzan, SE, M.Si, Ak, CA

**HALAMAN PENGESAHAN**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB  
PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK**

**(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Surakarta).**

**OLEH:**

**ARUM SARI**

**B 200 110 185**

**Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

**1. Fauzan, SE, M.Si, Ak, CA**

**(Ketua Dewan Penguji)**

(.....)

**2. Dr. Zulfikar SE, M.Si**

**(Anggota I Dewan Penguji)**

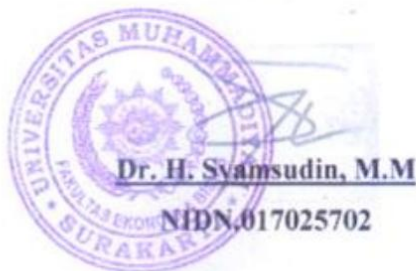
(.....)

**3. Drs. Suyatmin WA., M.Si**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

**Dekan**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Agustus 2019

Penulis



**ARUM SARI**

**B 200 110 185**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB  
PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Surakarta).**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang diumpulkan di analisis dengan analisis data yang pertama kali dilakukan dengan menguji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Teknik analysis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan Membayar Pajak dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $(1.545) < t \text{ tabel } (1,986)$  dengan tingkat signifikan sebesar  $(0.126) > \alpha (0,05)$ . Sehingga variabel, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai  $t$  hitung  $(2.009) > t \text{ tabel } (1,986)$  dengan tingkat signifikan sebesar  $(0.047) < \alpha (0,05)$ . Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan  $t$  hitung sebesar  $2.478 > t \text{ tabel } (1,986)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0.015) < \alpha (0,05)$ . Pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan  $t$  hitung sebesar  $4.929 > t \text{ tabel } (1,986)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0,000) < \alpha (0,05)$ .

**Kata Kunci:** kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sanksi pajak, kemauan membayar pajak.

**Abstract**

Research aims to know the factors that affect the taxpayer's willingness to pay taxes. Research is a quantitative study. This research was conducted in KPP Pratama Surakarta with 100 respondents. The data collected was analyzed using data analysis which was first performed by testing classic assumptions before testing hypotheses. Testing classic assumptions in this study is the normality test, multicollinearity test and heteroskedasticity test. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis. Based on the results of the obtained research results, consciousness pays tax has no effect on the willingness to pay taxes with a T-count value of  $(1,545) < t \text{ Table } (1.986)$  with a significant rate of  $(0126) > \alpha (0.05)$ . So that the variables, knowledge and understanding of taxation regulations affect the willingness to pay taxes with a value of T count  $(2,009) > This (1.986)$  with a significant rate of  $(0047) < \alpha (0.05)$ . Good perception of the effectiveness of the taxation system affects the willingness to pay tax with  $t$  count of  $2,478 > this (1.986)$  with a significance rate of  $(0.015) < \alpha (0.05)$ . The effect of tax

sanctions affects the willingness to pay taxes with the T-Count of 4,929 > this (1.986) with a significance rate of  $(0.000) < \alpha (0.05)$ .

**Keywords:** awareness of paying taxes, knowledge and understanding of taxation regulations, good perception of the effectiveness of taxation systems, tax sanctions, willingness to pay taxes.

## 1. PENDAHULUAN

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan pemenuhan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, sumber penerimaan negara tersebut berasal dari berbagai sektor baik sektor internal maupun sektor eksternal. Sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak. Sedangkan penerimaan dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal.

Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal terbesar dalam APBN. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Ni Luh Supadmi, 2008).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang pribadi atau badan wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat (UU KUP No.28 Tahun 1997). Penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat mempunyai kemauan finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya

pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menggali potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah serta *non tradable* seperti properti, jasa keuangan dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis. Pemberian intensif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPH. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai. *Tax Rasio* dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat). Pajak daerah dan penerimaan SDA migas dengan PDB nominal. Sedangkan *taxratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal. *Tax Ratio* tahun 2016 sebesar Rp. 1.285,0 triliun, untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.472,2 triliun dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.618,1 triliun (Budget In Brief APBN 2018).

Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, berupa jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagai kepentingan umum lainnya guna memberikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Dengan Penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diharapkan pembangunan negara dapat semakin berjalan dengan lancar. Selain dipengaruhi faktor-faktor ekonomi, keberhasilan penerimaan perpajakan juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan secara konsisten. Secara umum, kebijakan perpajakan ditujukan untuk optimalisasi penerimaan.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *selfassesment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melapor sendiri pajaknya,

menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kerelaan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus di sadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil pembayaran pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Ghozali (1976) dalam Handayani mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan (Sudjana 2006) dalam Handayani. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat mengintegrestasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham untuk mengetahui peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintegrestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2009).



Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Tatiana dan Priyo (2009), dan Widayati dan Nurlis (2010) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Perusahaan*. Perbedaannya adalah tahun dilakukan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan di tahun 2019. Perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, serta study kasus di KPP Pratama Surakarta.

Dari Gambaran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam sebagai alat kebenaran. Maka dari itu penelitian ini diberi judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK** (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010:13). Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai  $t$  hitung sebesar  $(1.545) < t$  tabel  $(1,986)$  dengan tingkat signifikan sebesar

(0.126)  $\diamond \alpha$  (0,05). Sehingga variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti bahwa hipotesis pertama diterima ( $H_1$  ditolak). Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Surakarta maka semakin tinggi juga kemauan mereka untuk membayar pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi yang positif terhadap pajak.

Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak itu sendiri. Jika seseorang memandang bahwa pembayaran pajak itu penting, maka ia akan berperilaku patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasinya pada tindakan mereka. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan arah positif yang berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini mendukung pernyataan dari Hardiningsih dan Yulianawati (2011), meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara.

Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidakmaunya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Hardiningsih dan Yulianawati (2012), Hariyadi (2012), Fikriningrum dan Syafrudin (2012), Permadi (2013); yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki nilai  $t$  hitung (2.009) >  $t$  tabel (1,986) dengan tingkat signifikan sebesar  $(0.047) < \alpha$  (0,05). Sehingga variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti bahwa hipotesis kedua diterima (H2 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan mereka dalam membayar pajak.

Hal ini berarti wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang pajak sehingga mereka akan memiliki kemauan yang cukup baik untuk membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya, demi kesejahteraan masyarakat banyak. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,

membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercapai unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak yang terutang. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pengetahuan wajib pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Hariyadi (2012), Fikriningrum dan Syafrudin (2012), Permadi et al. (2013) yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Artinya, Tingginya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hal ini dikarenakan wajib pajak cukup baik memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin paham dan mengerti wajib pajak akan peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki sebesar

$2.478 > t_{\text{tabel}} (1,986)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0.015) < \alpha (0,05)$ . Sehingga variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti bahwa hipotesis ketiga diterima (H3 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik sehubungan dengan fektivitas sistem perpajakan akan muncul apabila fiskus menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan akses yang didapat oleh wajib pajak serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga akan mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan. Persepsi yang baik akan memberikan pengaruh yang baik khususnya kepada wajib pajak. Semakin baik persepsi atas efektivitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Handayani, et al. (2012), apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan *ter-enkripsi* (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-SPT* dan *e- Felling* yang memudahkan dan lebih cepat Wajib Pajak dalam melaporkan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Hariyadi (2012) variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Fikriningrum dan Syafrudin (2012) yang menemukan hasil bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Arah positif ini dimaksudkan bahwa semakin baik persepsi yang diberikan wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan maka semakin besar pula

kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini karena wajib pajak cukup baik mengetahui tentang sistem pajak yang baru secara online. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak  $t$  hitung variabel sanksi pajak memiliki sebesar  $4.929 > t_{tabel} (1,986)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0,000) < \alpha (0,05)$ . Sehingga variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, itu berarti bahwa hipotesis keempat diterima (H4 diterima).

Menurut Mardiasmo (2003) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006)

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan: Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan Membayar Pajak dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $(1.545) < t_{tabel} (1,986)$  dengan tingkat signifikan sebesar  $(0.126) > \alpha (0,05)$ . Sehingga variabel, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai  $t$  hitung  $(2.009) > t_{tabel} (1,986)$  dengan tingkat signifikan sebesar  $(0.047) < \alpha (0,05)$ .

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan  $t$  hitung sebesar  $2.478 > t_{tabel} (1,986)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0.015) < \alpha (0,05)$ .

Pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan  $t$  hitung sebesar  $4.929 > t_{\text{tabel}} (1,986)$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0,000) < \alpha (0,05)$ . Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi sistem pelayanan, sistem perpajakan dan peraturan-peraturan perpajakannya yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Disarankan untuk lebih giat dan bekerja keras mensosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta diharapkan semakin meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak, sehingga pembangunan negara dapat diselenggarakan secara lancar dan tidak terhambat karena adanya wajib pajak yang belum mau untuk membayar pajak.

Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian dengan melakukan penelitian pada beberapa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama tidak hanya di Kabupaten Surakarta namun di luar Kabupaten Surakarta semisal dilakukan di seluruh KPP di eks Karisidenan Surakarta, sehingga dapat dilakukan perbandingan dan diperoleh hasil lebih kompleks, Dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak seperti norma moral, faktor ekonomi /tingkat pendapatan, intensitas kerjasama dengan Instansi lain, informasi masyarakat mengenai peranan pajak, dan sebagainya, sehingga memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas penelitian yang jauh lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anu, Antonius, 2004, "*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*" Di Kota Salatiga. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Setya Wacana (tidakdipublikasikan).

Bintoro Wardiyanto. (2007). “*Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007)*”. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik. Volume 21, Nomor 4, Hal :328 s/d 335. Universitas Airlangga Surabaya. Diambil dari: [www.tinyurl.com/kjm84hx](http://www.tinyurl.com/kjm84hx) pada 11 Mei 2014.

Bhuono Agung Nugroho. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

*Budged In Brief APBN, 2018.*

Devano, S dan Siti Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta.

Fikriningrum, W.K., Syfruddin, M. 2012. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*”. Jurnal akuntansi Vol.1 nomor 2, Hal 1-15 Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19*. Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi analisis multivariante dengan program IBM SPSS 20*: Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, Sapti Wuri. (2012). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati 2011. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”. Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol.3, No.1 Nopember 2011.

Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). “*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*”. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. Diambil dari: [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id) pada 15 September 2014).

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mujiyati dan Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.



Muliari, Ni Ketut. (2010). *“Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana Denpasar. Diambil dari: [www.ojs.unud.ac.id](http://www.ojs.unud.ac.id) pada 13 Mei 2014.

Nugroho, Rahman Adi. (2012). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening”*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. Diambil dari: [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id) pada 20 April 2014.

Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Permadi, T., Nasir, A. Dan Yuneita Anisma, Y. 2013. *“Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Study kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”*. Jurnal Volume 21 nomor 2 juni 2013.